

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Agus, E. P., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Budihardjo, E. (2009). *Arsitektur dan kota di Indonesia*. Alumni.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan publik di negara-negara berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, H. (2011). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Grasindo.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Subarsono. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori dan praktik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriati. (2012). *Metodologi penelitian komputerisasi akuntansi*. LABKAT.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI Bandung.
- Tahir. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik (Teori, proses, dan studi kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal/Penelitian Terdahulu

- Amiruddin, A., & Mulyadi, D. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal sebagai identitas daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 115–128.
- Fadli, M., & Kurniasih, D. (2022). Implementasi kebijakan tata ruang dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 45–58.
- Haryono, A. (2019). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung terkait penerbitan izin mendirikan bangunan rumah tinggal di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Lex Publica*, 4(1), 1–14.
- Hidayat, R., & Prasetyo, B. (2023). Efektivitas implementasi peraturan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 27(1), 89–102.
- Imanuel, I., & Zain, Z. (2023). Akulturasi sosial budaya Melayu dalam penerapan arsitektur bangunan di Indonesia. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 10(1), 53–64.
- Iskandar, D., & Nurhayati, S. (2024). Implementasi kebijakan pelestarian kearifan lokal dalam pembangunan perkotaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(1), 67–80.
- Linanda (2018) Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Terhadap Bangunan Gedung Perhotelan Di Kota Batam. 3 (2), 21-38
- Maulana, R., & Putri, A. N. (2022). Analisis implementasi kebijakan bangunan gedung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 24(2), 133–144.
- Patullah, Asma and Rahendra Sucipta, Pery and Irman, Irman (2022) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Di Kota Tanjungpinang. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pratama, Y., & Suryani, E. (2023). Koordinasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 201–215.

- Rahman, F., & Yuliana, N. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan warisan budaya daerah dalam perspektif governance. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 11(2), 150–164.
- Ramdhani, A., dan M.A. Ramdhani. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi*. Negara, 11(1), 1-12
- Ritiduan (2021) Implementasi Kebijakan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah Di Kota Surabaya) *Publika*. 9 (5) Tahun 2021, 15-30
- Sari, P. M., & Wibowo, H. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik pada pemerintah daerah. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 77–90.
- Suska (2012) Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9 (2), Juni 2012

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepri nomor 1 tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu